



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANU HARDIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUKU BADAN
3. NHK : 442129

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.088.822.800

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 542.322.800
2. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 334.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 112.500.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 364.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA / Q MANUAL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 D Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 AT / BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B6H AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.850.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 377.869.418

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.901.542.218

**III. HUTANG**

Rp. 38.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.863.542.218

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.